

## Pembelajaran Sejarah pada Masa Kolonialisme Belanda

Faizal Arifin<sup>1</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul 'Ulum<sup>1</sup>

Email: [faizalarifin@stiabiru.ac.id](mailto:faizalarifin@stiabiru.ac.id)

**Abstract:** *This article aims to examine the development of historical learning during the Dutch Colonialism period, especially after the implementation of the Ethical Policy. In the field of education, indigenous elite students have access to Western (Dutch) education with the Colonial-Centrism curriculum, including history lessons. Historical learning in the early twentieth century characterized by learning materials oriented towards European superiority, Dutch legitimacy over Colonialism in the Dutch East Indies, delegitimation of rulers (kings/sultans) in Nusantara, and the indoctrination of colonized nations to accept Colonialism. This research used the historical method, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The results of this research showed us that historical learning during the Colonialism period was oriented to legitimize the political power of Dutch Colonialism and indoctrination for indigenous elites to accept Colonialism. That is because historical learning has a strategic role in influencing elite indigenous students to receive and support colonial domination and structure in society. On the other perspectives, history lessons produced indigenous students that increase the ability of critical thinking about Colonialism and Western Imperialism.*

**Keywords :** *History of Historical Learning, Dutch Colonialism, Imperialism, Dutch East Indies, Ethical Politics.*

**Abstract :** Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan pembelajaran sejarah pada masa Kolonialisme Belanda, khususnya setelah pemberlakuan Politik Etis. Dalam bidang edukasi, pelajar elit bumiputera memiliki akses menempuh pendidikan Barat (Belanda) dengan kurikulum yang Kolonial-Sentris termasuk pelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah pada awal abad XX diwarnai dengan materi pembelajaran yang berorientasi pada superioritas bangsa Eropa, legitimasi Belanda atas Kolonialisme di Hindia Belanda, delegitimasi penguasa (Raja/Sultan) di Nusantara, serta indoktrinasi bangsa terjajah untuk menerima Kolonialisme. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran sejarah pada masa Kolonialisme berorientasi untuk melegitimasi kekuasaan politik Kolonialisme Belanda dan indoktrinasi bagi elit bumiputera untuk menerima Kolonialisme. Hal tersebut disebabkan karena pembelajaran sejarah memiliki peran strategis untuk mempengaruhi para pelajar elit bumiputera untuk menerima dan mendukung dominasi serta struktur kolonial pada masyarakat. Di sisi lain, pelajaran sejarah menghasilkan pelajar bumiputera yang kritis terhadap Kolonialisme dan Imperialisme Barat.

**Kata kunci :** Sejarah Pembelajaran Sejarah, Kolonialisme Belanda, Imperialisme, Hindia Belanda, Politik Etis.

## PENDAHULUAN

Politik etis berakar pada orientasi kemanusiaan sekaligus keuntungan ekonomi, yang dilatarbelakangi oleh kecaman terhadap Pemerintah Belanda melalui kritik dalam novel *Max Havelaar* (1860). Kebijakan politik etis dimulai tahun 1901 melalui pernyataan Ratu Wilhelmina untuk meneliti kesejahteraan masyarakat Hindia Belanda. Menteri Urusan Daerah Jajahan yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal yaitu Alexander W. F. Idenburg melaksanakan politik etis dimulai tahun 1902 dengan tiga prinsip utama yaitu pendidikan, pengairan, dan perpindahan penduduk (Ricklefs, 2008, pp. 327–328).

Kajian mengenai politik etis banyak dilakukan oleh para sejarawan maupun akademisi karena dianggap sebagai faktor pendorong sekaligus pendukung pergerakan nasional Indonesia, khususnya karena aspek pendidikan. Penelitian Fakhriansyah dan Patoni (2019), menyimpulkan bahwa pendidikan dalam politik etis sebenarnya diberikan secara terbatas dengan akses pendidikan yang tidak luas serta berorientasi kepentingan ekonomi pemerintah kolonial. Meskipun demikian terbatas, pendidikan menjadi faktor penting bagi runtuhnya dominasi kolonial (Fakhriansyah & Patoni, 2019).

Keterbatasan pada penelitian politik etis dalam bidang pendidikan adalah belum banyak dilakukan kajian mengenai pembelajaran sejarah pada pendidikan Kolonial. Sebagai salah satu faktor penting dalam kurikulum pendidikan Belanda, patut diduga pelajaran sejarah meningkatkan kemampuan berpikir kritis elit bumiputera. Awalnya pelajaran sejarah ditunjukkan sebagai indoktrinasi serta mengajarkan agar siswa bumiputera menerima kolonialisme Belanda, namun tujuan ini

gagal. Oleh karena itu, kajian mengenai pelajaran sejarah yang diterapkan serta kurikulum yang menyertainya penting untuk diteliti.

Pelajaran sejarah tidak hanya membicarakan mengenai peristiwa-peristiwa masa lalu yang tidak berhenti pada hapalan tanggal dan tahun, karena memiliki *nurturant effect* lain yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis-logis dan memberikan stimulus bagi pengembangan nilai-nilai implementatif untuk dipraktekkan dalam kehidupan kemanusiaan. *Nurturant effect* tersebut tidak disadari oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang memandang pelajaran sejarah dari *instructional effect* sebagai ajang untuk menyebarkan narasi mengenai legitimasi kolonialisasi dan imperialisasi kepada para murid *Hollanders* maupun *Inlanders*. Pembelajaran sejarah dapat menjadi penggerak bagi politik pemerintahan, yang dapat mempengaruhi tujuan, posisi hingga materi pelajaran sejarah agar sesuai dengan ideologi serta kepentingan politik penguasa (Batubara & Aman, 2019).

Pada awal abad XX, anak-anak bumiputera mulai diizinkan menempuh pendidikan 'modern' Belanda melalui kebijakan politik etis yang diterapkan di Hindia Belanda. Politik etis dilatarbelakangi oleh pengaruh politik Mr. Van Deventer yang mengkritik pemerintah kolonial untuk menaruh perhatian yang lebih luas terkait pendidikan dan pengajaran bagi bumi-putera (Agung & Suparman, 2012, p. 24). Berdasarkan penelitian Maftuh, disebutkan bahwa kebijakan politik pendidikan kolonial, mulai dari pendidikan rendah sampai tertinggi tidaklah dimaksudkan untuk mencerdaskan orang-orang Indonesia, melainkan tak lebih daripada sekedar memberi kesempatan kepada

keluarga golongan tertentu yang dipercaya untuk ikut serta mempertahankan kelangsungan kolonialnya (Maftuh, 2009, p. 228).

Adapun faktor-faktor utama yang melatarbelakangi kebijakan-kebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda dilaatarbelakangi oleh faktor politik, ekonomi, Kristenisasi, rasialisme, situasi dan kondisi internal Belanda, serta kondisi umat Islam (Maftuh, 2009, pp. 228–229). Faktor politik, yakni suasana perpolitikan baik yang terjadi di Parlemen Belanda maupun di Hindia Belanda. Faktor ekonomi, yakni pendirian sekolah-sekolah selalu didorong pertimbangan untung-rugi secara ekonomis. Faktor Kristenisasi, adalah upaya penyebaran agama di Hindia Belanda. Faktor rasialisme yang berkaitan dengan struktur sosial dalam kolonialisme yang meletakkan bangsa Belanda dan kulit putih lainnya, sebagai kelas yang tertinggi. Faktor situasi dan kondisi internal di Negeri Belanda yang memaksa Pemerintah Koloni. Faktor kondisi umat Islam Indonesia, yaitu fenomena *revival* umat Islam yang memicu pemerintah kolonial Belanda untuk menyainginya dengan mendirikan sekolah-sekolah.

Pendidikan kolonial bagi bumi-putera memiliki struktur dan tingkatan yang khas, disebut oleh Sri Soetjiatingsih dan Sutrisno Kutoyo sebagai “Pendidikan Dualisme di Hindia Belanda” yang berlangsung pada tahun 1900 sampai 1942 (Soetjiatingsih & Kutoyo, 1981, pp. 124–125). Disebut dualisme karena bumiputera dapat memilih diantara dua yaitu pertama pendidikan rendah yang khusus untuk bumi-putera, dan kedua pendidikan yang menggunakan bahasa pengantar Belanda yang dimulai dari pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi (universitas).

Sebagai upaya menghadapi kritik, Pemerintah Hindia Belanda akhirnya membolehkan anak-anak dari kalangan bumi-putera diperbolehkan memasuki Sekolah Rendah Belanda, yang dapat dilanjutkan ke Sekolah Dokter Jawa dan Sekolah Pamong Praja (Agung & Suparman, 2012, p. 24). Sekolah Kelas II diperbanyak, bahkan pada tahun 1903 diadakan “Sekolah Desa” yang lamanya tiga tahun dan hanya belajar membaca, menulis, berhitung, bahasa daerah, dan menggambar.

Sekolah Desa yang digagas oleh Gubernur Jenderal van Heutz dibiayai oleh desa dan pemerintah yang memberikan subsidi sangat terbatas karena tujuannya hanya pemberantasan buta huruf yang nyatanya berjalan secara lambat. Dirasakan pula bahwa pemerintah tidak serius dalam menyelenggarakan pendidikan bagi rakyat bumi-putera karena dalam pendidikan rendah tidak diajarkan bahasa Belanda, ilmu pengetahuan modern, dan sejarah (Soetjiatingsih & Kutoyo, 1981, p. 124).

Pelajaran bahasa Belanda karena berbagai desakan akhirnya dimasukkan dalam Sekolah Kelas I mulai dari kelas III sampai kelas VI agar anak bumi-putera dapat mengikuti pelajaran yang lebih tinggi yang didominasi dan diwajibkan penggunaan bahasa Belanda. Namun tetap saja, Sekolah Kelas I yang memberikan pendidikan selama 6 tahun tidak diberikan mata pelajaran sejarah Indonesia. Sifat pengajaran pada masa Kolonial Hindia Belanda tidak berisi semangat kebangsaan atau tidak berisi usaha-usaha untuk perkembangan kebudayaan kebangsaan, adapun perubahan kurikulum pada 1914 pun hanya mendekatkan elit lapisan atas bumi-putera kepada kebudayaan Belanda dan bukan untuk pertumbuhan dan perkembangan bangsa secara bebas dan merdeka (Agung & Suparman, 2012, pp. 23–24).

Berdasarkan latar belakang historis serta beberapa penelitian mengenai politik etis dalam bidang pendidikan, diketahui bahwa penting untuk mengkaji pelajaran sejarah sebagai salah satu bagian dalam kurikulum Belanda. Penelitian ini secara umum membahas mengenai bagaimana implementasi pembelajaran sejarah dalam kurikulum Belanda yang dikaji berdasarkan sumber primer sezaman pada masa Kolonialisme buku teks pelajaran yang digunakan, kesaksian para murid bumiputera, serta berbagai dokumen pemerintah Kolonial. Penulis membatasi cakupan temporal dari sejak pemberlakuan kebijakan politik etis 1901 sampai tahun 1942 yang menandai runtuhnya dominasi Kolonialisme Belanda.

#### **METODE**

Metode penelitian yaitu cara serta proses sistematis yang dipilih peneliti secara spesifik dengan tujuan menyelesaikan masalah penelitian adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan objek penelitian utamanya yaitu masa lalu atau peristiwa sejarah maka digunakan metode sejarah. Metode sejarah yang digunakan terdiri dari heuristik, kritik yang terdiri dari kritik internal dan eksternal, serta historiografi yaitu penulisan sejarah yang menggabungkan penafsiran (interpretasi), penjelasan (eksplanasi), dan penyajian (ekspose) (Sjamsuddin, 2012, p. 13).

Heuristik merupakan pengumpulan data sejarah melalui penelusuran sumber yang memiliki relasi dengan objek penelitian. Pencarian sumber diutamakan sumber primer (sezaman), selain menggunakan studi literatur dari karya para sejarawan serta jurnal penelitian. Setelah sumber didapatkan, dilakukan tahapan kritik internal dan eksternal untuk menguji sumber dan validitasnya, serta membandingkan antara fakta yang didapatkan dengan fakta dari sumber

sejarah lainnya melalui sistem kartu (Herlina, 2020, pp. 46–57). Tahapan selanjutnya adalah historiografi atau penulisan sejarah yang secara langsung menyajikan penafsiran (interpretasi), penjelasan (eksplanasi), dan penyajian (ekspose) dalam bentuk hasil penelitian pada artikel ini.

## HASIL

### **Kewajiban Kompetensi Sejarah bagi Pendidik**

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda memiliki beberapa pandangan mengenai pentingnya memahami dan menguasai kompetensi sejarah, khususnya bagi para pendidik di berbagai tingkatan struktur dalam sistem pendidikannya. Kewajiban menguasai kompetensi sejarah diantaranya ditunjukkan kepada guru atau pendidik, guru les serta kepala sekolah. Dalam mengkaji bagian ini, peneliti bersumber pada buku referensi pendidikan di Hindia Belanda karya D. Brakel yang diterbitkan tahun 1914 berjudul *Vraagbaak voor ouders (voogden) in Nederlandsch Indië; die hun kinderen (pupillen) niet naar Holland zenden*.

Salah satu kompetensi wajib seorang pendidik atau guru (*Onderwijzer*) adalah memiliki keakraban dengan peristiwa-peristiwa sejarah Belanda dan Hindia Belanda (Brakel, 1914, p. 244). Seorang pendidik atau guru pada masa kolonial, memiliki kewajiban untuk memahami peristiwa-peristiwa sejarah Belanda dan Hindia Belanda sebagai kompetensi dasar bagi setiap guru yang mengajar dan bukan hanya guru sejarah. Sebenarnya bukan hanya guru, pengajar les dari rumah ke rumah juga dalam sistem pendidikan Belanda, harus memiliki kompetensi pengetahuan Sejarah Belanda dan Hindia Belanda (Brakel, 1914, p. 247).

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda juga menetapkan kompetensi bagi Kepala sekolah (*Hoofd-onderwijzer*) untuk menguasai sejarah secara lebih dalam. Kompetensi yang wajib dikuasai oleh kepala sekolah adalah menguasai beberapa pengetahuan tentang tokoh-tokoh sejarah Klasik, keakraban dengan fakta-fakta utama dari sejarah Abad Pertengahan dan sejarah Baru, terutama dengan peristiwa-peristiwa utama Abad ke-19, pengetahuan tentang sejarah Belanda sebagai Tanah Air Belanda serta kekuasaan Kolonialisme yang dimilikinya (Brakel, 1914, p. 246).

Dari kutipan di atas diketahui fakta bahwa kompetensi seorang kepala sekolah (*Hoofd-onderwijzer*), tidak hanya wajib memahami sejarah Belanda dan Hindia Belanda, akan tetapi secara lebih mendalam wajib mengetahui berbagai materi lain dalam sejarah yaitu tokoh-tokoh sejarah Klasik. Mengetahui dan dapat menjelaskan fakta-fakta utama sejarah Abad Pertengahan dan Sejarah Zaman Baru (*enlightment*), dan terutama penguasaan atas peristiwa-peristiwa sejarah penting pada abad ke-19. Selain itu kepala sekolah wajib memiliki kompetensi sejarah Belanda sebagai tanah air bagi kolonialisme, dan memiliki pengetahuan sejarah akan negeri-negeri koloni Belanda, terutama sejarah Hindia Belanda.

### **Buku Teks Rujukan Pelajaran Sejarah**

Buku teks merupakan salah satu bagian penting dalam materi pelajaran sejarah. Dengan berbagai keterbatasan, pemerintah Kolonial mengeluarkan buku rujukan bagi pelajaran sejarah. Buku teks sejarah setebal 97 halaman dengan judul *Korte geschiedenis van Nederlandsch-Indië* diterbitkan tahun 1917 (Carelse, 1917) merupakan sumber bagi penelitian ini. Buku tersebut merupakan rujukan yang digunakan untuk sekolah *lagere scholen*, *MULO* dan *Middelbaar Onderwijs*. Buku tersebut berisi



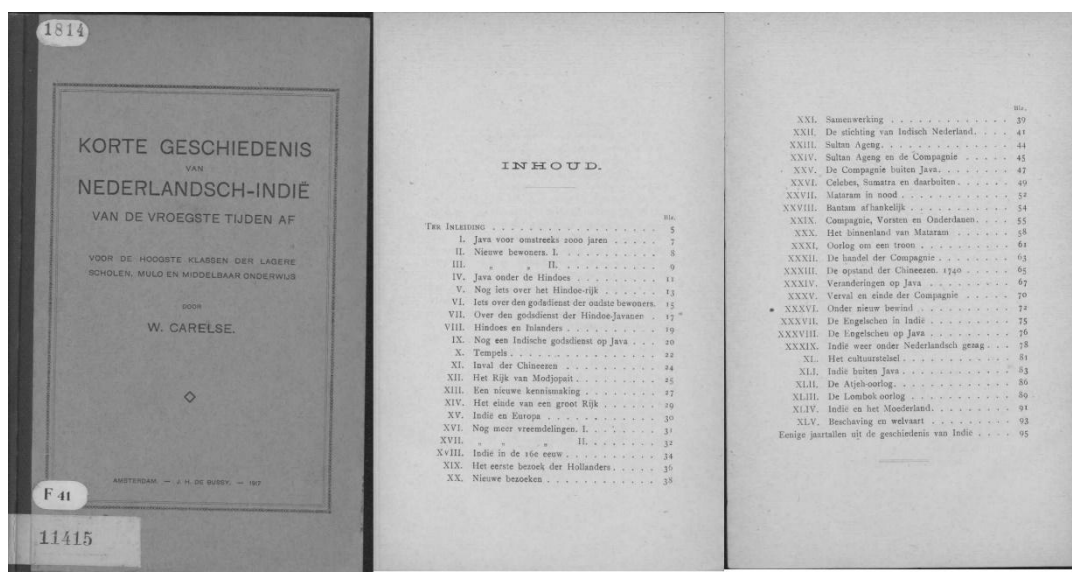
sejarah Nusantara dalam perspektif kolonial yang disusun secara kronologis dan ringkas tentang pelajaran sejarah. Berikut merupakan periodisasi yang disusun peneliti karena dalam teks tidak dilakukan pembagian berdasarkan periode namun berisi bab saja.

Titik awal periodisasi dalam buku tersebut dimulai dengan sejarah pra-Islam dengan waktu mundur sekitar 2000 tahun lalu sampai masa Kerajaan Majapahit. Dimulai dengan materi tentang Jawa 2000 tahun yang lalu, dilanjutkan dengan hadirnya penduduk baru, Jawa di antara umat Hindu, Kerajaan Hindu, agama penduduk tertua (pra-Hindu), agama orang Jawa Hindu, Hindu dan pribumi, Agama Hindia lainnya di Jawa, kuil, serangan Cina, Kerajaan Majapahit dan akhir dari sebuah kerajaan besar tersebut.

Materi pada periode kedua adalah mengenai latar belakang kedatangan *Kompeni* Belanda yaitu VOC, perusahaan perniagaan multi nasional terbesar dunia pada zamannya, hingga runtuhnya VOC. Diantara materi teks referensi tersebut adalah Hindia dan Eropa, orang-orang asing di Nusantara, Hindia pada abad ke-16, Kunjungan pertama dari Belanda dan kunjungan selanjutnya, Kerjasama, Dasar-dasar Hindia Belanda, Sultan Ageng dan kompeni, kompeni (VOC) di luar Jawa, Sulawesi, Sumatera dan seterusnya, Mataram membutuhkan kompeni, Banten, *Compagnie, Vorsten, dan Onderdanen*, bagian dalam Mataram, perang untuk tahta Mataram, Perdagangan dengan Kompeni, pemberontakan orang Cina, Perubahan Jawa, berakhirnya Kompeni.

Periode ketiga yaitu kekuasaan Pemerintah Kolonial Belanda di Nusantara, yang dimulai awal abad 18 hingga peristiwa-peristiwa aktual sebelum tahun 1917. Diantara bab yang terdapat dalam periode ini adalah

Nusantara di bawah pemerintahan baru, Bangsa Inggris di Hindia dan Jawa, Hindia kembali di bawah otoritas Belanda, Sistem budaya, Hindia di luar Jawa, Perang Aceh, Perang di Lombok, Hindia dan Tanah Air, Peradaban dan kemakmuran, dan beberapa peristiwa 'kontemporer' di Hindia.



**Gambar 1.** Buku teks sejarah yang digunakan tahun 1917 beserta konten/isi buku

Selain ketiga periode yang ditentukan dan dipengaruhi ideologi pemerintah Kolonial, terdapat bab atau materi lain yang menjadi suplemen tambahan bagi buku. Yaitu susunan kronologi peristiwa sejarah penting sejak 2000 tahun yang lalu, kelahiran Kristus, pelayaran Eropa, sampai penaklukan Aceh, yang kesemuanya Barat-sentris (Carelse, 1917, pp. 95–96). Buku teks ini ditutup dengan lampiran peta Dunia yang berisikan rute pelayaran orang Eropa ke Nusantara.

### **Pelajaran Sejarah di Sekolah Kolonial**

Mata pelajaran sejarah menjadi kompetensi murid-murid pada pendidikan kolonial di berbagai tingkatan. Mata pelajaran yang diberikan pada *Europeesche Lagereschool (ELS)* seperti yang diberikan pada sekolah di

Negeri Belanda, dengan perkecualian pelajaran Sejarah Tanah Air (Belanda) diganti dengan Sejarah Negeri Belanda dan Hindia Belanda (Brakel, 1914). Sedangkan *Gewoon Lager Onderwijs* merupakan sekolah dasar dengan jumlah sekolah 20 di Jawa dan Madura dan diluar itu 15 sekolah, dengan jumlah siswa dapat mencapai 200 orang (Soetjiatingsih & Kutoyo, 1981, p. 127). Pada kelas permulaan sekolah dasar tersebut para siswa mendapatkan mata pelajaran *die der geschiedenis van Nederland en Nederlandsch-Indië* (Sejarah Belanda dan Sejarah Hindia Belanda) (Brakel, 1914, p. 4).

Adapun sekolah menengah lanjutan yaitu *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)* mendapatkan pelajaran *die der algemeene geschiedenis* (Sejarah Umum) bagi murid-muridnya (Brakel, 1914, p. 24). Sedangkan, AMS A II yang berorientasi klasik Barat terdapat pelajaran Sejarah Kebudayaan Kuno Barat, namun sejarah kebudayaan/kesenian 'Indonesia' tidak diberikan tempat (Soetjiatingsih & Kutoyo, 1981, p. 133).

Selain sekolah formal, sekolah keagamaan juga memiliki mata pelajaran sejarah. Diantaranya adalah *Zusters Ursulinen* (Suster Ursulin) merupakan lembaga pendidikan untuk suster khususnya wanita muda yang bertempat di Weltevreden terdapat pelajaran *De Geschiedenis (Algemeene en Vaderlandsche)* (Brakel, 1914, p. 29). Adapun sekolah *Ursulinen-School To Bandoeng* yang merupakan sekolah persiapan untuk pendidikan *lager* (dasar) dan *uitgebreid lager* (lanjutan), mewajibkan siswanya untuk menempuh mata pelajaran *De geschiedenis van Nederland en Nederlandsche Indies* (Sejarah Belanda dan Sejarah Hindia Belanda) dan bahkan selain sejarah umum belajar juga *De Fransche en Engelsche taal* *Algemeene geschiedenis* (Sejarah Sastra Perancis dan Inggris) (Brakel, 1914,

p. 32). Sekolah ini juga terhubung dengan *Fröbelschool* (sekolah Frobel) dan *industrieschool* (Sekolah Industri).

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda juga menetapkan diantara ujian untuk *Middelbaar Onderwijs*, diperlukan kemampuan output pembelajaran sejarah yakni kompetensi yang wajib dimiliki setiap siswa yaitu *van zijn kennis van de voornaamste feiten en jaartallen der vaderlandsche geschiedenis* (pengetahuan siswa tentang fakta-fakta utama sejarah dan tahun-tahun bersejarah) (Brakel, 1914, p. 32).

Urgensi pembelajaran sejarah juga merupakan salah satu kompetensi pada HBS dimana untuk ujian akhir *Hoogere Burgerscholen (HBS)*, terdapat mata uji Sejarah (Brakel, 1914, pp. 38–39). Di sekolah *Hoogere Burgerschool En Pensioonaat Voor Meisjes Te Weltevreden*, kandidat yang menginginkan masuk sekolah tersebut harus memiliki kemampuan sejarah diantaranya *Van hare bekendheid met de Vaderlandsche Geschiedenis* (Memiliki keakraban dengan Sejarah Tanah Air Belanda) (Brakel, 1914, p. 49).

Selain murid dan pendidik, kompetensi sejarah juga diperlukan untuk beberapa persyaratan pekerjaan baik di bidang sipil maupun non-sipil. Diantaranya adalah ujian akhir pegawai administratif Hindia Belanda, dimana kandidat akan mendapatkan tes mengenai *de geschiedenis van N. I., alsmede de historie en de methoden der zending in den Maleischen Archipel sedert 1800* (Sejarah Hindia Belanda serta sejarah dan metode *zending* di Nusantara/Kepulauan Melayu sejak tahun 1800) (Brakel, 1914, p. 147).

Selain pegawai administratif, pendaftaran ke sekolah militer seperti pada *Meester-Cornelis*, memerlukan kompetensi yaitu mata uji Sejarah yang lebih mendalam. Kompetensi untuk masuk dalam sekolah militer,

siswa sebagai pelamar harus memiliki pemahaman pengetahuan tentang [1] sejarah Klasik dan Abad Pertengahan serta pengantar menuju Sejarah Baru; [2] Sejarah Baru: Gambaran umum mengenai sejarah Baru sampai dengan 1648, terutama menyangkut tokoh-tokoh dan peristiwa-peristiwa yang telah memberikan pengaruh dominan pada perkembangan masyarakat pada umumnya, atau lebih khusus terkait dengan Belanda. [3] [Penguasaan] Sejarah Patriotisme Belanda hingga 1568 dengan sangat baik; sejak 1568 hingga 1648 dengan paparan lebih detail dan ikhtisar ringkas tentang sejarah Koloni Belanda dan harta-harta benda, sejak pembentukan otoritas Belanda - 1648. Sebagai perbandingan, kursus perdagangan pun yaitu *Prins Hendrikschool Te Batavia-Handelskursus*, selain mendapatkan penguasaan kemampuan pencatatan (akuntansi) dan kemampuan bahasa, juga sampai pemahaman mengenai sejarah yaitu *Handelsgeschiedenis en staathuishoudkunde* (sejarah perdagangan dan ekonomi baja), meskipun tidak spesifik berhubungan langsung dengan sejarah Belanda dan Sejarah Hindia Belanda (Brakel, 1914, p. 109).

### **Tokoh Bumiputera Belajar Sejarah**

Tokoh pertama yang menjadi bagian dari penelitian tentang pelajaran sejarah pada pendidikan Kolonialisme adalah Soekarno. Dalam pembahasan ini artikel pada koran *Leeuwarder Courant* berjudul "*Soekarno, Strijder Voor Eenheid En Onafhankelijkheid Van Indonesie*" menjadi salah satu referensi penting. Perjalanan pendidikan Soekarno dimulai ketika ia masuk dalam sekolah *Hollandsch-Indische*, di mana ayahnya adalah kepala sekolah. Ketika dia melalui lima kelas, ayahnya memutuskan bahwa waktunya telah tiba bagi Soekarno untuk masuk ke jenis sekolah yang lebih tinggi, yang awalnya ditujukan untuk anak-anak Belanda: sekolah

dasar Eropa. Pada masa transisi, Soekarno kehilangan satu tahun: ia datang di kelas lima ELS. Setelah selesai ELS, ayahnya mewajibkannya untuk melanjutkan pendidikannya ke HBS. Sebelum itu, Soekarno pergi ke dan menjadi murid seorang teman ayahnya, H.O.S. Tjokroaminoto. Bertahun-tahun Soekarno tinggal di sana, mendapat pengaruh yang sangat besar pada kehidupan selanjutnya. HBS kemudian dilewati Soekarno tanpa banyak kesulitan dimana Soekarno masuk pada usia 15 tahun dan lulus pada saat usianya 20 tahun.

Setelah memutuskan untuk meninggalkan sebuah beasiswa studi ke luar negeri, keinginan lama Soekarno untuk menjadi seorang seniman kembali bergelora. Pada 1921 Soekarno melanjutkan studi yang dapat menyalurkan jiwa seni dengan kemampuan *hardskill* teknik, yaitu *Technische Hogeschool* di Bandung (“Soekarno, Strijder Voor Eenheid En Onafhankelijkheid Van Indonesie,” 1970). Kemudian di Surabaya, datang berita bahwa Tjokroaminoto ditangkap karena sifat anti Kolonialisme organisasi politik Sarekat Islam yang dipimpinnya, sehingga Soekarno memutuskan untuk bekerja demi mengurus berbagai keperluan keluarga Tjokroaminoto. Tjokroaminoto dibebaskan setelah tujuh bulan dan Soekarno kembali ke *Technische Hogeschool* (sekarang ITB).

Meskipun Soekarno juga menghabiskan cukup banyak waktu untuk kegiatan politik, studinya berkembang dengan baik dan sangat cepat sehingga pada 25 Mei 1926 ia lulus sebagai insinyur sipil dengan spesialisasi arsitektur dan waktu belajarnya telah selesai. Soekarno kemudian memilih jalan non-kooperatif sebagai kelanjutan dari ideologi yang ditularkan gurunya, Tjokroaminoto sang tokoh Sarekat Islam, sehingga Soekarno menolak bergabung dan bekerjasama dengan

pemerintah Belanda. Soekarno menerima beberapa tugas pribadi untuk pembangunan perumahan, yang kemudian ia bekerjasama dengan Ir. Anwari pada sebuah perusahaan arsitektur. Yang menarik adalah Soekarno pernah menjadi guru sejarah dan matematika di sekolah swasta yang digerakkan oleh Dr. Setia Buddhi Danoedirdjo (nama aslinya adalah Dr. E.F.E. Douwes Dekker) (“Soekarno, Strijder Voor Eenheid En Onafhankelijkheid Van Indonesie,” 1970).

Dalam sebuah koran Belanda yaitu *Leeuwarder courant*, disebutkan lebih lanjut bahwa seorang inspektur yang menghadiri pelajaran sejarah dari Soekarno menyatakan dia tidak cocok untuk pekerjaannya (“Soekarno, Strijder Voor Eenheid En Onafhankelijkheid Van Indonesie,” 1970). Patut diduga bahwa seorang *inspecteur* yang menghadiri kelas pelajaran sejarah dari Soekarno keberatan jika Soekarno mengajarkan dan mempertajam kemampuan berpikir kritis siswa-siswanya dengan pelajaran sejarah. Kemampuan berpikir kritis dikhawatirkan mengganggu stabilitas jalannya pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, sehingga pengawas tersebut keberatan dan menilai Soekarno tidak cocok mengajarkan sejarah. Dalam hal kecil saja misalnya, Soekarno enggan menggunakan sebutan “raden” yang menunjukkan sikap kritisnya terhadap feodalisme yang saat itu bergandengan tangan dengan kolonialisme Hindia Belanda.

Dari pelajaran sejarah, Soekarno memahami pentingnya pergerakan rakyat melalui organisasi yang mendorong cita-cita kemerdekaan menentang kolonialisme Barat, sehingga ia aktif bekerjasama dan mendirikan berbagai organisasi sebagai corong perjuangan. Soekarno mendirikan *Algemene Studie Club* (Klub Studi Umum) di Bandung pada

tahun 1925, di mana ia menjadi ketua. Selain studi klub, Soekarno juga aktif dalam *Jong Java*. Soekarno juga mengadakan pidato dimana pada setiap kesempatan ia menyampaikan penentangannya terhadap pemerintahan kolonial Belanda, yang selanjutnya menunjukkan bahwa Soekarno adalah orator handal yang mampu menarik kerumunan massa yang banyak. Pada 4 Juli 1927 Soekarno mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia, yang namanya diubah setahun kemudian di Partai Nasional Indonesia dengan para pendiri lainnya yaitu Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo, dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, Mr. Budiardjo dan Mr. Soenarjo.

Dalam buku autobiografi Soekarno yang ditulis oleh Cindy Adams, bung Karno menjelaskan bagaimana besarnya pengaruh guru-guru yang meskipun berbangsa Belanda, telah mengajarkan bagaimana demokrasi Yunani dari pelajaran sejarah. Pada zaman demokrasi Yunani Kuno, para wakil rakyat bebas mengeluarkan pendapat dan mengajar rakyat untuk menentang penindasan dan penghisapan, sambil membangun kemerdekaan dan keadilan (Soetjiatingsih & Kutoyo, 1981, p. 138).

Materi pelajaran mengenai sejarah Yunani Kuno tersebut ternyata membuat Soekarno berpikir bahwa kondisi di Hindia Belanda mengkhawatirkan dimana berbanding terbalik dengan realitas sosial kondisi dimana penindasan, penghisapan, kemerdekaan dan keadilan. Hal tersebut, tidak hanya berhenti pada pemikiran personal saja, akan tetapi juga diungkapkan dan mengadu argumentasi-argumentasinya dalam *debating club* bersama siswa-siswa Belanda di HBS Surabaya mengenai kolonialisme (Soetjiatingsih & Kutoyo, 1981, p. 139).

Dalam perspektif ilmu pendidikan, saat Soekarno mempresentasikan hasil penelitian atau pemikirannya di depan kelas atau dalam *debating*



*club*, menurut Maor sebenarnya melalui kegiatan tersebut kemampuan berpikir kritis tingkat tinggi akan terbukti (Tjahjardarmawan, 2017, p. 13). Pemikiran Soekarno juga dipengaruhi oleh diskusi tokoh-tokoh dari berbagai aliran yang berdiskusi di rumah Tjokroaminoto, tempat Soekarno tinggal, sehingga dalam menelurkan pemikirannya dalam media massa penentangan kolonialisme yaitu *Oetoesan Hindia*. Pemikiran kritis Soekarno membuatnya dijuluki “Karel” oleh seorang guru wanita Belanda. HBS bagi Soekarno, telah menjadi suatu forum pertemuan kebudayaan Barat dengan pemuda Indonesia yang minoritas, dan menjadi tempat “transformasi” jiwa kemerdekaan bangsa Belanda kepada kita (Soetjiatingsih & Kutoyo, 1981, p. 139).

Tokoh selanjutnya yang mengalami pendidikan masa Kolonialisme adalah Roeslan Abdulgani yang kelak menjadi Menteri setelah Indonesia merdeka (Azis, 1952). HBS Surabaya selain oleh Soekarno juga pernah menjadi tempat belajar bagi Roeslan Abdulgani (masuk tahun 1932), dan lulus pada tahun 1934 dengan mengikuti kelas 4 dan kelas 5 dari *de wiskundige afdeeling*. Di samping itu juga ada *de literaire afdeeling* yang banyak mempelajari sastra dan kebudayaan, termasuk bahasa Yunani dan bahasa Latin. Roeslan Abdulgani dalam pemaparan pengalamannya mengenai sistem pendidikan belanda menyebutkan bahwa:

“Suatu kenyataan yang tak dapat diungkiri ialah bahwa jiwa pendidikan dan sistem pelajaran dalam lingkungan HBS Surabaya adalah jiwa kemerdekaan dan kebebasan yang kuantitatif dan kualitatif sangat bernilai sekali. Sesuai dan sama seperti yang dipraktekkan di Negeri Belanda sendiri. Inilah konsekuensi dari *concordantie-beginsel*. Dengan begitu anak pribumi yang dapat masuk ke lingkungan HBS itu ikut menghirup udara segar kemerdekaan. Padahal di luar itu adalah masyarakat kolonial. Dengan adanya situasi kontradiktif dan antagonistis ini jiwa anak-anak pribumi

selalu memberontak. Udara segarnya HBS memberi dorongan dan inspirasi untuk menentang sistem kolonialisme Belanda. Dengan demikian HBS Surabaya merupakan suatu "*enclave dan oase*" di tengah-tengah masyarakat kolonial."

Pemikiran-pemikiran kritis murid-murid HBS, selain melalui pengajaran dari guru-guru, juga melalui budaya literasi yang tinggi di tengah berbagai keterbatasan sumber bacaan. Misalnya, di kelas 4 pada mata pelajaran bahasa, murid-murid diwajibkan membaca karya sastra yang harus dibaca dan akan diuji melalui ujian lisan yaitu 30 buku Sastra Belanda, 10 buku Sastra Inggris, 10 buku Sastra Jerman, dan 10 buku Sastra Perancis dengan berjumlah 60 buku (Soetjiatingsih & Kutoyo, 1981, p. 142). Hal tersebut menjadi bahan renungan dan evaluasi bagi pengajar sejarah khususnya bahwa untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis bagi siswa harus juga didampingi dengan budaya literasi yang baik. Selain melalui pelajaran sastra, menurut Roeslan Abdulgani, mata pelajaran sejarah sangat mempertebal patriotisme dan nasionalisme.

Roeslan Abdulgani diajari seorang guru sejarah berkebangsaan Belanda bernama Postma mengajarkan berbagai pelajaran yang berharga dan berpengaruh bagi nasionalisme Indonesia. Pelajaran sejarah yang diberikan dianggap sebagai ajaran sejarah yang progresif dan tak disebutkan sedikitpun bahwa sejarah merupakan hafalan tanpa makna yang membosankan:

"Dari Postma beliau [Roeslan Abdulgani] mendapat pelajaran tentang Revolusi Perancis, yaitu revolusi yang berpengaruh terhadap revolusi-revolusi antara tahun 1830- 1850 di Jerman, dan disusul dengan adanya kontra revolusi dan seterusnya. Juga adanya gerakan pemuda dan mahasiswa Jerman pada awal abad ke-19, tumbuhnya gerakan buruh di Jerman dan Inggris, lahirnya Manifesto Komunis oleh Karl Marx, meningkatnya sistem kapitalisme dan kolonialisme Eropa menjadi imperialisme modern

sekitar tahun 1870, akibat-akibat imperialisme modern terhadap Asia Afrika, perjuangan Garibaldi dan Mazzini untuk persatuan Italia, dan aktivitas Bismarck untuk menyatukan seluruh Jerman. Semuanya itu mendebarkan hati murid-murid pribumi HBS Surabaya.”

Pelajaran sejarah progresif diberikan di HBS, menurut Dr. H. Roeslan Abdulgani bertentangan dengan pelajaran sejarah di MULO Ketabang Surabaya yang mengutamakan hafalan dan berbau rasialisme, mengagungkan sejarah bangsa kulit putih dan meremehkan sejarah bangsa sawo matang (Soetjiatingsih & Kutoyo, 1981, p. 143).

HBS memfasilitasi perkembangan peserta didiknya melalui berbagai aktifitas pendidikan diantaranya terdapat *discussion group* yang diatur oleh kepala sekolah dan juga terdapat *debating club* dimana pada akhirnya terdapat anak-anak pribumi dengan teman Cina dan tiga murid Belanda yang simpati terhadap nasionalisme dan patriotisme Indonesia (Soetjiatingsih & Kutoyo, 1981, p. 141). *Debating-club* telah berhasil menghadirkan diskusi-diskusi dengan sumber-sumber primer seperti pidato pembelaan Bung Hatta di muka pengadilan Belanda di Den Haag tahun 1928 berjudul *De on uitgesproken pleifrede van Mon. Hatta voor de Arrondissements rech tbank te 's-Gravenhage*, yang sebelumnya dilarang beredar, juga dibahas pidato pembelaan Bung Karno di pengadilan kolonial di Bandung pada 2 Desember yaitu *Indonesie klaagt aan!* Para murid berhasil mentransformasikan pemikiran Soekarno dan Hatta, dimana terdapat persamaan bahwa keduanya mencerminkan jiwa ingin merdeka.

Sekolah HBS menjadi tempat yang terbuka bagi pengembangan intelektualitas bahkan jika harus menentang kolonialisme Belanda. Hal tersebut dapat dilihat dengan kewajiban membaca buku karya sastra yang

dibaca bersama di muka kelas pada pelajaran bahasa Belanda, yaitu buku *Max Havelaar of de koffi-veilingen de Nederlansche Handelsmaatschappij* oleh Multatuli yang terkenal itu. Menurut Roeslan Abdulgani, bahwa dengan dijadikannya bacaan wajib buku tersebut mengakibatkan timbulnya kesadaran merasa bersalah atau *Schuldbewustheid* hingga “ingin menebus dosa” di kalangan Pemerintah Belanda juga dirasakan khususnya guru-guru Belanda di HBS (Soetjiatingsih & Kutoyo, 1981, p. 142). Menarik untuk dicermati bahwa buku anti kolonial yang telah membakar semangat itu ditetapkan sebagai buku wajib termasuk bagi mayoritas murid-muridnya adalah anak-anak Belanda di HBS.

## **PEMBAHASAN**

Aspek-aspek pembelajaran sejarah yang terdapat dalam penelitian ini adalah kompetensi pendidik mengenai sejarah, buku teks rujukan pelajaran sejarah, penerapan pelajaran sejarah, serta objek pendidikan yaitu murid yang mengikuti proses pembelajaran dalam sistem pendidikan Belanda. Berbagai aspek tersebut akan dibahas dan dianalisis pada bagian pembahasan ini.

Pemahaman sejarah merupakan kompetensi yang wajib dikuasai bagi pendidik mulai dari guru kelas, guru les, sampai kepala sekolah. Bahkan kepala sekolah harus menguasai materi sejarah secara lebih dalam. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda memiliki pandangan bahwa pelajaran sejarah penting untuk dipahami dan dikuasai karena menjadi basis dan legitimasi bagi ideologi pemerintah kolonial yaitu Kolonialisme yang ditunjukkan kepada peserta didik. Sebelum peserta didik diajarkan sejarah versi kolonial, maka peran pengajar menjadi penting sebagai perantara indoktrinasi serta salah satu sumber belajar.

Kompetensi pelajaran sejarah juga digunakan pada berbagai ujian dalam tingkatan jenis sekolah. Diantara sekolah formal yang mewajibkan sejarah adalah *Europeesche Lagereschool (ELS)*, *Gewoon Lager Onderwijs*, *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)*, *Algemeene Middelbare School (AMS)*, serta *Hoogere Burgerschool (HBS)*. Sekolah keagamaan juga memiliki mata pelajaran sejarah diantaranya *Zusters Ursulinen*, *Ursulinen-School*, *Fröbelschool* (sekolah Frobel) serta *industrieschool* (Sekolah Industri). Selain sekolah, kompetensi sejarah juga diperlukan untuk pekerjaan di bidang sipil maupun non-sipil seperti ujian akhir pegawai administratif Hindia Belanda, pendaftaran sekolah militer *Meester-Cornelis*, sampai kursus perdagangan (ekonomi).

Dalam sistem pendidikan Belanda, pelajaran sejarah dijadikan alat untuk mendukung tujuan, program serta kebijakan pemerintah Kolonial. Oleh karena itu, materi pelajaran sejarah selain Sejarah Hindia Belanda, juga mewajibkan Sejarah Belanda yang disebut 'tanah air' menjadi bagian penting dari materi yang diberikan kepada siswa Belanda maupun bumiputera (Brakel, 1914, p. 247). Materi sejarah juga berorientasi sejarah Eropa-sentris yang mengagungkan superioritas Barat sehingga materi berikut menjadi penting diantaranya tentang tokoh sejarah klasik Eropa, peristiwa Abad Pertengahan dan Pencerahan di Eropa sampai peristiwa abad 18-19 di Eropa. Materi pelajaran sejarah tidak mementingkan kebesaran bangsa Indonesia di masa lalu. Hal tersebut dapat terlihat dari susunan kronologis serta materi sejarah yang diajarkan pada sekolah-sekolah Belanda. Selain itu diajarkan sejarah penguasaan akan negeri-negeri koloni Belanda, seperti Hindia Belanda juga Hindia Barat.

Buku teks yang dijadikan rujukan bagi pelajaran sejarah juga didesain sedemikian rupa sehingga sejalan dengan agenda penyebaran ideologi Kolonialisme. Peneliti menganalisis bahwa perspektif kolonial sangat berpengaruh pada buku teks dengan berdasarkan pada beberapa temuan yang sarat akan hubungan dengan kepentingan kolonialisme Belanda. Temuan-temuan tersebut akan disebut sebagai propaganda pada buku teks. Propaganda pertama, Bangsa Kulit Putih merupakan bangsa yang lebih beradab dibandingkan bumiputera dan hal ini merupakan rasialisme dan mengungkapkan superioritas Barat. Hal inilah yang disebut disaksikan oleh Roeslan Abdulgani yang menyatakan bahwa pelajaran sejarah pada masa kolonial mengutamakan hapalan dan berbau rasialisme, mengagungkan sejarah bangsa kulit putih dan meremehkan sejarah bangsa sawo matang (Soetjiatingsih & Kutoyo, 1981, p. 143).

Propaganda kedua, Nusantara dan Jawa berakar dan berasal dari Hindu, sehingga terlihat kesan untuk menjauhkan Islam dari penduduk Nusantara dan termasuk tidak banyak membahas mengenai sejarah Islam di Nusantara. Hal ini merupakan bentuk antisipasi pemerintah Kolonial menghadapi umat Islam Indonesia karena fenomena *revival* umat Islam dengan memperbanyak pendirian lembaga pendidikan kolonial (Maftuh, 2009, pp. 228–229).

Propaganda ketiga, VOC dan Belanda datang ke Nusantara adalah untuk berbisnis dan bukan menjajah, adapun pada akhirnya berkuasa itu karena kesalahan raja-raja Nusantara yang saling bertikai. Dengan narasi ini, Belanda membangun legitimasi kekuasaannya atas penjajahan di Nusantara dengan menyebut diri sebagai penyelamat karena berperan

menengahi konflik antar kerajaan sehingga seyogyanya bumiputera menerima Kolonialisme Belanda.

Propaganda keempat, melalui simbol pengagungan tokoh-tokoh yang dianggap sebagai penjajah namun dalam perspektif kolonial adalah pahlawan. Diantara tokoh Barat yang ditampilkan melalui lukisan yaitu potret J. P. Koen, Daendels, Raffles, van Heutz, tanpa ada satupun tokoh Nusantara. Sebaliknya disebutkan bahwa Sultan Agung adalah “raja yang kejam yang tidak menyelamatkan nyawa manusia [dimana] seluruh wilayah hancur, desa dan kota dibakar, penduduk dibunuh atau diambil sebagai budak” (Carelse, 1917, p. 45).

Propaganda kelima, Belanda memberikan stigma dan label jahat bagi siapapun pihak yang menentang Kolonialisme Belanda. Misalnya Belanda menyebut dirinya pahlawan dan sebaliknya disebutkan bahwa rakyat Aceh yang melawan Belanda adalah bajak laut, pencuri, licik, dan sebagainya. Sedangkan ketika Aceh ditaklukan disebutkan bahwa “Belanda [akhirnya] melakukan yang terbaik dengan memberi orang-orang Aceh kemakmuran yang seharusnya sudah begitu lama [mereka dapatkan]” (Carelse, 1917, p. 88).

Bagi murid-murid bangsa Belanda, pelajaran sejarah telah menanamkan rasa superioritas mereka sebagai bangsa penjajah dan sebaliknya bagi bumi-putera pelajaran sejarah menanamkan identitas sebagai bangsa terjajah. Narasi kebesaran kaum Eropa ke Nusantara menjadi salah satu bagian yang berimplikasi pada produk pendidikan yang menghasilkan siswa-siswa bumiputera yang menghasilkan kemampuan berpikir kritis, mengembangkan nilai-nilai positif untuk diimplementasikan. Hal tersebut memberikan landasan bagi siswa

bumiputera untuk melawan Kolonialisme dan Imperialisme Belanda dan membangkitkan kesadaran kolektif kebersamaan sejarah bumiputera sebagai proses pengenalan diri.

Proses pengenalan diri, menurut Wiraatmadja, merupakan titik awal dari timbulnya harga diri, kebersamaan, dan keterikatan (*sense of solidarity*), rasa keterpautan dan rasa memiliki (*sense of belonging*), kemudian rasa bangga (*sense of pride*) terhadap bangsa dan tanah air sendiri (Isjoni, 2007, p. 75). Pelajaran sejarah secara tidak langsung telah menanamkan rasa bangga (*sense of pride*) terhadap bangsa dan tanah air Indonesia, meskipun pendidikan Belanda untuk bumi-putera baru dimulai sejak awal abad XX melalui politik etis (*etische politiek*) dan hanya terbatas pada anak-anak dari kalangan elit.

Fenomena yang tidak direncanakan Belanda tersebut menunjukkan bahwa mata pelajaran sejarah, telah membuka cakrawala dan pemikiran para tokoh untuk mengambil pelajaran, dan tidak hanya berhenti pada intelektualitas, pengajaran sejarah dapat menggerakkan para siswa untuk bertindak dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. Tindakan-tindakan (*Acts*) yang meningkatkan keterampilan berpikir yang didasari atas pengaruh dari aktifitas-aktifitas pedagogis di ruang kelas, jika ditinjau dari taksonomi Bloom, maka dapat dikategorisasi bahwa murid-murid HBS dengan pelajaran sejarah tak berhenti pada tingkatan keterampilan berpikir tingkat rendah (*LOTS/Low Order Thinking Skills*) akan tetapi hingga keterampilan berpikir tingkat tinggi (*HOTS/High Order Thinking Skills*) (Tjahjardarmawan, 2017, pp. 12–13). Para murid tidak hanya mengingat (C1) dan memahami (C2), akan tetapi juga sampai pada tahapan analisis (C4), sintesis (C5), dan evaluasi (C6), karena setelah



mendapatkan pelajaran sejarah, mereka juga mengambil sintesis dan mengevaluasi kondisi lingkungan sosial politik dan ekonomi yang terjadi.

Perlu diketahui pula bahwa situasi politik pada lembaga pendidikan Belanda turut mempengaruhi dan meningkatkan rasa kritis para murid bumiputera. Misalnya angkatan Soekarno yang berada pada situasi tahun 1916-1921 diliputi progresivitas aktivitas gerakan Serikat Islam, berakhirnya Perang Dunia I, naiknya ekspor gula, serta janji 'merdeka' dari Pemerintah Belanda tahun 1918 yang tidak dipenuhi telah mendorong pergerakan nasional Indonesia termasuk para murid bumiputera menuju ke arah radikalisme. Situasi tersebut telah mencetak banyak generasi yang kritis terhadap Kolonialisme bahkan cenderung radikal.

Periode selanjutnya diantaranya zaman Mukarto dan Roeslan Abdulgani, situasi politik diliputi pengaruh krisis *malaise* 1930, pemberontakan kapal perang *Zeven Provinciën*, serta tangan-besi pemerintah kolonial terhadap pemimpin-pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Panasnya situasi politik umum dan itu ternyata masuk juga ke dalam gedung sekolah HBS (Soetjiatingsih & Kutoyo, 1981, p. 141).

Pemikiran kritis para murid, yang telah sampai pada tingkatan mengevaluasi situasi politik di ruang-ruang kelas, jika dihubungkan dengan pendapat Stasz *et al.* dan Thomas mengenai HOTS dimana kondisi keterampilan berpikir tinggi tersebut menandai adanya proses pembelajaran yang ditandai adanya: (a) kolaborasi antara guru, siswa, dan lintas ilmu (b) mendorong keingintahuan, eksplorasi, dan penyelidikan (c) pembelajaran berpusat pada siswa (d) kegagalan dipandang sebagai kesempatan belajar (e) pengakuan terhadap usaha, tidak hanya pada

prestasi (f) belajar secara kontekstual dalam kehidupan nyata (Tjahjadarmawan, 2017, p. 13). Meskipun taksonomi Bloom muncul jauh setelah Indonesia merdeka, akan tetapi pandangan Bloom dan ahli pendidikan cukup memberikan gambaran bahwa pendidikan sejarah yang diajarkan pada masa kolonialisme Belanda berhasil melahirkan tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia yang bertindak dan beraksi pada kehidupan nyata siswanya di masa depan sebagai bentuk tertinggi dalam taksonomi kognitif.

Eksplanasi serta interpretasi yang disajikan di atas menunjukkan penelitian sejarah melalui metode sejarah dapat dibantu dengan bidang keilmuan lain diantaranya konsep atau teori pendidikan dalam membahas tema-tema sejarah pendidikan. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu sumber-sumber primer sezaman dengan jumlah yang terbatas mengenai sistem pendidikan kolonial khususnya yang berkenaan dengan pembelajaran sejarah. Namun, kajian terhadap kompetensi pendidik, materi pelajaran, buku teks rujukan pelajaran, serta kesaksian murid, yang berhubungan dengan pelajaran sejarah dapat membuka ruang bagi penelitian selanjutnya dengan kualitas maupun kuantitas data yang lebih beragam. Penelitian ini cukup memberikan informasi mengenai situasi, kondisi, serta implikasi dari pembelajaran sejarah pada masa Kolonialisme Belanda yang diharapkan dapat berkontribusi bagi kajian Sejarah Pendidikan di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Pembelajaran sejarah yang dipelajari oleh bumiputera memberikan pencerahan serta kemampuan berpikir kritis terhadap situasi politik yang terjadi di Hindia Belanda. Tujuan serta agenda indoktrinasi dalam

pelajaran sejarah mengenai superioritas Barat serta legitimasi atas Kolonialisme Belanda secara implementatif memberikan pengaruh yang tidak diharapkan ideologi pemerintah. Politik etis melalui pendidikan, terdapat pembelajaran sejarah dengan pengaruh Kolonialisme melalui kompetensi pendidik, berbagai ujian sekolah formal maupun non-formal, materi pelajaran yang disediakan, buku teks yang dijadikan rujukan, serta murid yang dijadikan target kolonialisasi.

Proses edukatif yang dilakukan melalui pelajaran sejarah pada murid bumiputera justru memicu kritik terhadap Kolonialisme Belanda yang akhirnya memicu keruntuhan dominasi kolonial. Oleh karena itu sejarah merupakan salah satu pelajaran yang memiliki urgensi bagi kemajuan bangsa dan negara. Diharapkan berbagai temuan dan fakta sejarah dalam penelitian ini dapat menambah referensi mengenai sejarah pendidikan di Indonesia khususnya pada masa Kolonialisme Belanda.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agung, L., & Suparman, T. (2012). *Sejarah Pendidikan*. Penerbit Ombak.
- Azis, Z. (1952). *Mimbar Penerangan*. Kempen Djakarta.
- Batubara, U. N., & Aman. (2019). Perkembangan Pembelajaran Sejarah Pasca Kemerdekaan-Reformasi. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(1), 14–34.
- Brakel, D. (1914). *Vraagbaak voor ouders (voogden) in Nederlandsch Indië; die hun kinderen (pupillen) niet naar Holland zenden*. N. V. Mij. Vorkink.  
<https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBL07:000001988>
- Carelse, W. (1917). Korte geschiedenis van Nederlandsch-Indië van de vroegste tijden af. In *voor de hoogste klassen der lagere scholen, MULO en middelbaar onderwijs*. J. H. De Bussy.

- Fakhriansyah, M., & Patoni, I. R. P. (2019). Akses Pendidikan bagi Pribumi pada Periode Etis (1901-1930). *Jurnal PENDIDIKAN SEJARAH*, 8(2), 122–147.
- Herlina, N. (2020). *Metode Sejarah*. Satya Historika.
- Isjoni. (2007). *Pembelajaran sejarah pada satuan pendidikan*. Alfabeta.
- Maftuh. (2009). *Kebijakan Politik Pendidikan Hindia Belanda dan Implikasinya Bagi Pendidikan Islam (1900-1942)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2008*. Serambi.
- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi sejarah*. Penerbit Ombak.
- Soekarno, Strijder Voor Eenheid En Onafhankelijkheid Van Indonesie. (1970, June 22). *Leeuwarder Courant*, 10–11.
- Soetjiatingsih, S., & Kutoyo, S. (1981). *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tjahjarmawan, E. (2017). *Best Practice Guru dalam Tugas Pembelajaran di Sekolah*. Deepublish.